



Manajemen Keuangan Negara Dalam Pendidikan Indonesia

Joharni Pajrin

Mahasiswa Institut Elkatarie

Email : joharnipajrin@gmail.com

Abstrak

Bahwa dalam penelitian ini membahas aakan suaut manajemen keuangan dalam pendidikan di Indonesia. Sekolah mempunyai tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku, tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan dan tingkat pendidikan juga tanggung jawab fungsional yang profesional dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan yang menerima ketetapan berdasarkan ketentuan jabatannya. Akibat terbatasnya kemampuan orangtua dalam mendidik anaknya, maka dipercayakanlah tugas mengajar itu kepada orang dewasa lain yang lebih ahli dalam lembaga pendidikan formal. Sekolah menjadi produsen penghasil individu yang berkemampuan secara intelektual dan skill.

Kata Kunci : Manajemen, Keuangan Negara, Pendidikan, Indonesia.

Latar Belakang

Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian keterampilan dan keahlian. yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian/ keterampilan. Sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, dipimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya, sarana- parasarana,



data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Akibat terbatasnya kemampuan orangtua dalam mendidik anaknya, maka dipercayakanlah tugas mengajar itu kepada orang dewasa lain yang lebih ahli dalam lembaga pendidikan formal. Sekolah menjadi produsen penghasil individu yang berkemampuan secara intelektual dan skill. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal, sekaligus membentuk kepribadian anak didik yang tujuannya untuk mencapai 3 faktor yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotorik.

Sekolah mempunyai tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku, tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan dan tingkat pendidikan juga tanggung jawab fungsional yang profesional dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan yang menerima ketetapan berdasarkan ketentuan jabatannya.

Ada empat komponen yang saling berkaitan tentang profesi jabatan dalam kependidikan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu Staf Tata Usaha Administrasi, Staf Teknis pendidikan di dalamnya terdiri dari Kepala Sekolah dan Guru, Komite Sekolah sebagai badan independent yang membantu terlaksananya operasional pendidikan, dan Siswa sebagai peserta didik yang bisa ditempatkan sebagai komponen dengan tingkat pelayanan yang harus memadai. Hubungan keempatnya harus sinergis, karena keberlangsungan operasional sekolah terbentuknya dari hubungan "simbiosis mutualis", keempat komponen tersebut karena kebutuhan akan pendidikan sangat tinggi, tentulah harus dihadapi dengan kesiapan yang optimal semata-mata demi kebutuhan peserta didik.

Salah satu aspek yang sangat penting untuk mencetak peserta didik adalah aspek keuangan. Pengelolaan keuangan suatu lembaga pendidikan/sekolah sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan/sekolah. Ada beragam sumber dana yang dikelola oleh sekolah, baik dari pemerintah yang berupa dana BOS maupun dari dana dari masyarakat yang berupa iuran SPP.

Ketika dana masyarakat masuk, perlu dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang baik, profesional dan akuntabel. Secara umum pengelolaan keuangan sudah dikelola oleh lembaga pendidikan/sekolah tetapi masing-masing lembaga berbeda cara pengelolaannya tergantung dari besar kecilnya lembaga pendidikan tersebut. Pada sekolah yang daya dukung dari masyarakat rendah maka pengelolaan keuangannya sangat sederhana. Sedangkan yang daya dukung masyarakatnya tinggi, maka pengelolaannya akan cenderung lebih baik bahkan



mungkin lebih rumit. Kecenderungan ini maka lembaga pendidikan memang dituntut masyarakat lebih bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

Tujuan penyusunan makalah di atas adalah untuk mengetahui pengertian pengelolaan keuangan lembaga pendidikan/sekolah, mengetahui tugas pengelola keuangan lembaga pendidikan/sekolah, mengetahui proses pengelolaan keuangan lembaga pendidikan/sekolah dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan lembaga pendidikan/sekolah.

Pembahasan

A. Pengertian Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan/Sekolah

Pengelolaan Keuangan Lembaga keuangan/sekolah tidak bisa lepas dari yang disebut dengan manajemen. Pada dasarnya manajemen berasal dari to manage yang berarti mengatur, mengelola atau mengurus. Manajemen sering diartikulasikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerjasama untuk mencapai tujuan dan membuat system kerjasama yang lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan akan sangat bergantung kepada manajemen yang digunakan dalam suatu lembaga pendidikan yang bersangkutan. Manajemen tersebut akan efektif dan efisien apabila didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional untuk mengoperasikan lembaga pendidikan tersebut, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan komitmen tenaga kependidikan yang handal, sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Bila salah satu hal di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan dan/atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka efektivitas dan efisiensi pengelolaan lembaga pendidikan/sekolah tersebut kurang optimal.

Manajemen pendidikan adalah aktifitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan semua manajemen dalam tiap-tiap bagian tersebut haruslah diatur sebaik-baiknya dan serapi mungkin agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Namun fenomena yang terjadi sekarang ini ialah kurangnya perhatian manajer/pimpinan mengenai manajemen keuangan yang ada di suatu sekolah. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen lembaga pendidikan/sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen keuangan dilakukan



melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

Menurut Depdiknas (2000) bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan lembaga pendidikan/sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan/sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan/sekolah. Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu lembaga pendidikan/sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu:

1. Pemerintah, baik pemerintah pusat atau daerah, maupun kedua-duanya yang bersifat umum atau khusus yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan:
2. Orang tua peserta didik:
3. Masyarakat, baik yang mengikat maupun tidak mengikat.

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaanya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Dengan tujuan manajemen keuangan adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah
3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah

Untuk mencapai tujuan itu, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam mengalih sumber-sumber dana menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan serta memanfaatkan secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B. Prinsip-prinsip manajemen keuangan

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapatkan penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip



tersebut, yaitu: transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

1. Transparansi

Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan/sekolah, bidang manajemen keuangan yang transparansi berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan yang transparansi berarti adanya keterbukaan lembaga pendidikan, yaitu: keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan.



di sekolah. Disamping itu transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggungjawabnya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dengan tiga pilar utama yang menjadi syarat akuntabilitas yaitu: (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

3. Efektivitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garnet (2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam karena efektivitas tak berhenti pada tujuan tercapai saja tetapi sampai pada kualitatif hasil yang berkaitan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness" characterized by qualitative outcomes" jadi efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcome. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektif kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kualitas hasil suatu kegiatan. Efficiency "characterized by quantitative outputs" (Garner, 2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan itu adalah:

- a) Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.
- b) Dilihat dari segi hasil.



Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Joharni Pajrin | Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 No. 2. 2021
Hal 41-54

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.



Tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

C. Tugas pengelolaan keuangan lembaga pendidikan/ sekolah

Dalam pelaksanaan manajemen keuangan menganut azas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendahara. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otoritas yang telah ditetapkan.

Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Kepala Sekolah sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Bendaharawan, disamping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga

dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.

Manajer/Kepala Bagian Keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan keuangan sekolah, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur sekolah serta penggunaan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan sekolah. Yang harus dimiliki oleh Kepala Bagian Keuangan yaitu: strategi keuangan.

Strategi tersebut antara lain:

1. Perencanaan Strategis

Berpedoman keterkaitan internal dan kebutuhan eksternal yang datang dari luar. Terkandung unsur analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan, ekonomi dan financial.

2. Manajemen Strategis

Upaya mengelola proses perubahan, seperti: perencanaan, strategis, struktur organisasi, kontrol, strategis dan kebutuhan primer.

3. Pemikiran Strategis

Sebagai kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dan hasil secara berkesinambungan.

D. Proses pengelolaan keuangan lembaga pendidikan/sekolah

Komponen keuangan sekolah merupakan komponen yang menentukan terlaksananya



Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Joharni Pajrin | Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 No. 2. 2021
Hal 41-54

kegiatan belajar mengajar bersama komponen-komponen lain. Dalam pengelolaan Vincen P Costa(2000:175) memperlihatkan cara mengatur lalu lintas uang yang diterimadan



dibelanjakan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan penyampaian umpan balik.

Perencanaan menentukan untuk apa, dimana, kapan dan beberapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya. Pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Pengawasan dan pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan dilakukan oleh siapa. Umpan balik merumuskan kesimpulan dan saran-saran untuk kesinambungan terselenggaranya Manajemen Operasional Sekolah.

Menurut Muchdarsyah Sinungan menekankan pada penyusunan rencana (planning) di dalam setiap penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam penentuan rencana pengeluaran keuangan adalah menganalisis berbagai aspek yang berhubungan erat dengan pola perencanaan anggaran yang didasarkan pertimbangan kondisi keuangan, line of business, keadaan para nasabah/konsumen, organisasi pengelola, dan skill para pejabat pengelola.

Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi:

1. Perencanaan anggaran
2. Strategi mencari sumber dana sekolah
3. Penggunaan keuangan sekolah
4. Pengawasan dan evaluasi anggaran
5. Pertanggungjawaban

Pemasukan dan pengeluaran keuangan lembaga pendidikan/sekolah diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), hal yang ada hubungannya dengan RAPBS adalah sebagai berikut:

1. 1. Penerimaan (pemasukan/penerimaan)
2. Penggunaan (pembelanjaan)
3. Pertanggungjawaban (pelaporan)

Dengan adanya penerimaan keuangan dari orang tua peserta didik dan masyarakat maka dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, juga UUSPN No. 20 tahun 2003 bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, maka tanggung jawab atas pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.

Dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pengembangan. Biaya rutin adalah biaya



Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Joharni Pajrin | Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 No. 2. 2021
Hal 41-54

yang dikeluarkan rutin setiap bulannya dari tahun ketahun, seperti gaji tenaga kependidikan



baik gurumaupun nonguru, biaya operasional, biaya pemeliharaan baik gedung maupun sarana prasarana kegiatan pembelajaran.

Biaya pengembangan, seperti biaya pembangunan, perawatan dan perbaikan gedung, penambahan gedung, penambahan bangku, almari dan pengeluaran lain yang bersifat tetap. Dalam manajemen keuangan ada beberapa komponen yang terdiri dari:

1. Prosedur anggaran;
2. Prosedur akuntansi keuangan
3. Pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian
4. Prosedur investasi;
5. Prosedur pemeriksaan.

Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasi dilakukan setiap triwulan atau per semester. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan/sekolah harus dilaporkan secara rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari sekolah swasta dilakukan secara rinci dan transparan kepada dewan guru dan staf sekolah.

Kesimpulan

Pengelolaan keuangan lembaga pendidikan atau sekolah sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Manajemen keuangan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan. Sumber keuangan berasal dari pemerintah, orangtua peserta didik, dan masyarakat. Tujuan manajemen keuangan antara lain meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana sekolah, akuntabilitas, dan transparansi keuangan.

Prinsip-prinsip manajemen keuangan yang perlu diperhatikan melibatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Transparansi mencakup keterbukaan sumber keuangan dan penggunaannya. Akuntabilitas mengharuskan pertanggungjawaban sesuai dengan perencanaan. Efektivitas menekankan pencapaian tujuan secara kualitatif, sementara efisiensi berkaitan dengan hasil kegiatan.

Tugas pengelola keuangan di sekolah mencakup pemisahan tugas antara otorisator, ordonator, dan bendahara. Kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber dana, penempatan bendaharawan yang kompeten, serta penggunaan dana sesuai peraturan menjadi kunci untuk mencapai tujuan manajemen keuangan.

Proses pengelolaan keuangan melibatkan perencanaan anggaran, strategi mencari sumber dana, penggunaan keuangan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pelaporan dan pertanggungjawaban harus dilakukan secara rutin, transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku. Manajer keuangan di sekolah perlu memiliki strategi keuangan, melibatkan perencanaan strategis, manajemen strategis, dan pemikiran strategis.

Dalam dimensi pengeluaran, biaya rutin dan biaya pengembangan menjadi fokus. Biaya rutin melibatkan gaji tenaga kependidikan, biaya operasional, dan pemeliharaan, sementara biaya pengembangan mencakup pembangunan dan perawatan gedung. Komponen manajemen keuangan juga melibatkan prosedur anggaran, akuntansi keuangan, pembelajaran, pergudangan, investasi, dan pemeriksaan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). Manajemen Keuangan: Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama.
- Sudrajat, A. (2017, 5 April). Manajemen Sekolah. Diakses dari <http://AkhmadSudrajat.wordpress.com/a-opini/manajemensekolah>
- Muchdarsyah, S. (1993). Kredit Manajemen Dasar-Dasar. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: CV Tamita Utama.
- Costa, V.P. (2000). Panduan Pelatihan untuk Mengembangkan Sekolah. Jakarta: Depdiknas.